KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kab/Kota Tanah Datar

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OPD, Bidang dan Seksi yg memproses PBG dan SLF (SIMBG)?	OPD yang mengelola penyelenggaraan PBG Dinas PUPR Kab. Tanah Datar Bidang Cipta Karya (Rekomendasi Teknis), sdgkan PBG nya diterbitkan Oleh DPMPTSP	
2	Berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF? (dari penyiapan data sampai rekomendasi teknis)	28 hari kerja	
3	Berapa rata-rata waktu real pengurusan PBG dan SLF? (terbitnya PBG)	28 hari kerja	
4	Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?	Tidak lengkapnya permohonan serta tidak memahami situs simbg.pu.go.id Tidak paham ttg gambar teknis bangunan gedung	
5	Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF (OPD Teknis) ?	Kekurangan jumlah personil PNS untuk Penilik Bangunan dan Keterbatasan anggaran untuk honorarium Penilik Bangunan Non PNS Kurangnya Sosialisasi/Pemberitahuan kepada OPD Teknis terkait Perubahan/Pembaharuan (update) aplikasi SIMBG Kurangnya Pengkaji Teknis di Kab. Tanah Datar untuk SLF Bangunan Eksisting	
6	Sudah berapa PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)	1.2021 = 42 PBG/SLF 2.2022 = 144 PBG/SLF 3.2023 = 88 PBG/SLF	
7	Berapa orang Tim Profesional Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) di Kab/Kota	1. TPA = 6 orang 2. TPT = 6 orang	TPA: 1. Dr. Eng. Khadavi, S.T.,M.T. 2. Masril, S.T., M.T. 3. Ir. Dhasmayzal, AA. IAI 4. Soufyar, S.T.
8	Apakah penyelenggara PBG melaksanakan sosialisasi dan dalam bentuk apa?	Ada, dalam bentuk terjun langsung ke masyarakat dan menjelaskan keuntungan adanya PBG	
9	Apakah penetapan SHST oleh Kepala Daerah ? Kalau belum apa sebabnya?	Ada, Perbup No. 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Belanja Pemerin	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Apakah Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ Kota sudah mempunyai PBG dan SLF?	Ada beberapa Bangunan Gedung Negara yang mempunyai PBG	
11	Berapa Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF dari jumlah total BGN di Kabupaten/ Kota ?	Tidak dapat dihitung, karena belum adanya data yang valid	
12	Pada SIMBG terdapat proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, di antara item ini proses apa saja yg sudah dilaksanakan penyelenggaran SIMBG?	PBG, SLF dan SBKBG	
13	Kalau belum semua, apa penyebabnya?	Untuk RTB belum pernah dilaksanakan	
14	Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah diterbitkan?		
15	Apakah ada sanksi pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yang tidak sesuai PBG yg sudah diterbitkan (luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk sanksinya?		
16	Dalam penyelenggaraan PBG dan SLF apakah sudah mengacu sepenuhnya pada PP No. 16 Tahun 2021?	Sudah mengacu ke PP No 16 Tahun 2021	
17	Terkait dengan retribusi, apakah sudah ada Perda retribusi untuk PBG dan SLF?	Sudah, Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
18	Apakah ada aturan-aturan tambahan yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait PBG dan SLF?	Aturan terkait IPR dan KRK serta dokumen lingkungan	
19	Apakah sudah ada Perda RDTR dan RTBL, kalau belum prosesnya sudah sampai dimana?	Untuk perda RDTR masih dalam proses	
20	OPD Teknis, apakah sudah ada tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara yang bersertifikat ? Kalau ada, berapa orang?	Sudah, ada 2 pengelola teknis yang bersertifikat	

NC	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1	(2)	(3)	(4)
12			
		mma, s	2024
	Kepala UPTD P2BG Dinas BMCKTR Prov. Sumbar	PETE DOG MADO PERIZINAN	
	Yudi Herawan, S.T., M.T. Nip. 19740311 199803 1 003	Traselio WP SYUKALUVISYAUNA	W!